

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Sejak diberlakukannya otonomi daerah perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang (Yulitiawati and Rusmidarti, 2021). Hak otonomi daerah memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengelola dan menggali segala potensi sumber daya yang ada sehingga dapat meningkatkan pendapatannya demi terciptanya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah dapat dimulai dari lini terkecil yaitu desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hala *et al.*, 2022). Desa diberikan kesempatan untuk bisa mandiri mengurus tata pemerintahannya dan melaksanakan pemerataan pembangunan sehingga meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Pada saat ini pembangunan menjadi program kerja pemerintah, salah satunya melalui pemberian anggaran dana yang biasa dikenal dengan dana desa. Dana desa dijadikan sebagai sumber pendapatan desa yang dapat digunakan untuk membantu pembangunan desa. Sebagaimana telah tertuang dalam UU Nomor 6

Tahun 2014 tentang desa bahwasannya tujuan disalurkannya dana desa yaitu sebagai komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Salah satu desa yang ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu Desa Lokasari.

Desa Lokasari merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Desa Lokasari resmi berdiri pada tahun 2000 yang merupakan salah satu desa pemekaran di wilayah Sidemen, Karangasem pasca diberlakukannya desentralisasi atau otonomi daerah (Suputra, no date). Berdasarkan Data Kelurahan Desa Lokasari sendiri terdiri dari 6 Banjar Dinas yaitu Banjar Dinas Kebon, Banjar Dinas Sukahat, Banjar Dinas Lebu Bababakan, Banjar Dinas Lebu Anyar, Banjar Dinas Lebu Gede, dan Banjar Dinas Lebu Bungbungan. Jumlah penduduk Desa Lokasari yaitu 2804 jiwa dan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, pekebun, dan pedagang. Dilihat dari hal tersebut maka perlu perhatian serius dari pemerintah desa untuk bisa memaksimalkan pengelolaan Dana Desa agar dapat tercapainya kesejahteraan dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Perlu dilakukan pengawasan terhadap akuntansi pemerintah baik dalam perencanaan maupun pengendalian anggaran di hadapan publik. Akuntansi desa adalah aplikasi sektor publik lainnya yang harus diperhatikan karena termasuk kategori pengelolaan dana publik yang paling kecil dalam evaluasinya (Rahmi, 2023). Mengingat desa termasuk daerah otonom maka pemerintah desa wajib melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada kegiatan yang dilakukan sebagaimana yaitu untuk kepentingan desa dan sebagai upaya untuk menjalankan kesejahteraan desa. Desa memiliki sumber-

sumber pendapatan yang harus dikelola secara optimal dan akuntabel, seperti yang tertuang pada APBDes(Yuniarta and Purnamawati, 2020).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan suatu peraturan desa yang memiliki sumber-sumber penerimaan serta alokasi pengeluaran desa dengan jangka waktu tertentu (Rahmawati, Handayani, and Syafik 2022). APBDes terdiri dari tiga yaitu pembiayaan, pendapatan serta belanja desa. Sebelum diterimanya, terlebih dahulu akan ada rancangan APBDes yang dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh penting masyarakat dengan menjembatani aspirasi dari masyarakat setelah itu akan ada kesepakatan rancangan APBDes oleh Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Proses penganggaran akan dialokasikan pada kegiatan desa sehingga hasil perumusan strategi ataupun perencanaan yang dibuat akan sesuai dengan pertanggungjawaban desa (Magfiroh, 2020).

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) digunakan sebagai acuan untuk dapat menganalisis kinerja pemerintah desa. Kinerja pemerintah sendiri merupakan bagian dari implementasi suatu program, kegiatan atau kebijakan untuk mencapai visi dan misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis organisasi (Sofa, 2022). Adapun sistem pengukuran kinerja sektor publik yang dapat membantu meningkatkan ketercapaian suatu organisasi yaitu pengukuran yang mencakup aspek keuangan dan non keuangan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah harus lebih kritis, diperlukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh Lembaga Sektor Publik. Sehingga pengukuran kinerja keuangan sangat penting

untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah (Rahmi, 2023)

Akuntabilitas bukan hanya kemampuan lembaga sektor publik untuk menunjukkan bagaimana dana publik digunakan akan tetapi juga mencakup kemampuan untuk menjamin dari penggunaan dana publik tersebut termasuk bagaimana sumber daya dialokasikan secara ekonomis, efisien, dan efektif melalui tata pemerintahan publik yang baik. Pelaksanaan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan anggaran publik. Anggaran publik adalah suatu dokumen dalam menilai bagaimana situasi keuangan yang terjadi dalam organisasi tentang pendapatan, belanja dan segala aktivitas yang dilakukan (Magfiroh, 2020). Anggaran publik dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi salah satunya bagi pemerintah desa sehingga dapat memberikan informasi mengenai apa yang hendak dicapai di masa depan atas dasar kepentingan publik. Desa berkaitan erat dengan pengelolaan anggaran, maka sudah menjadi kewajiban desa untuk mewujudkan *good governance*. Tata Kelola pemerintah yang baik ditandai setidaknya dengan tiga hal yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas, dan *value for money* (Wuryanto Putri and Susliyanti, 2019).

Menurut Mardiasmo (2018) *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas. Ekonomi merupakan pembelian suatu barang dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga yang paling murah atau dapat dikatakan ekonomi berkaitan dengan seberapa efektif organisasi sektor publik memanfaatkan sumber daya *input* yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi merupakan perbandingan *output* dengan *input*

berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan. Sederhananya Efisiensi diartikan penggunaan sumber daya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan. Efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* (hasil) dengan *output*. Efektivitas membandingkan antara tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. *Value for money* dapat tercapai apabila penggunaan biaya masukan (*input*) lebih kecil untuk mencapai keluaran (*output*) dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tertentu (Magfiroh, 2020). Evaluasi kinerja harus dilakukan di seluruh lingkup pemerintah sehingga dalam upaya interaksi masyarakat dengan pemerintah, pemerintah mampu memberikan informasi laporan keuangan dengan baik mengenai aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah tersebut. Dengan pengukuran *value for money* suatu organisasi sektor publik dapat menilai akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah dengan melihat laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di setiap tahunnya.

Penelitian mengenai penilaian kinerja keuangan melalui pengukuran *value for money* telah banyak dilakukan di Indonesia. Magfiroh, (2020) meneliti Analisis Penerapan Pengukuran *Value For Money* Pada APBDes dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto) dengan metode kualitatif deskriptif. Dengan pendekatan *value for money*, maka akan dilakukan perhitungan atas anggaran dan realisasi anggaran dari data laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tahun 2016-2018. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan pemerintah Desa Parengan belum optimal dan terus berusaha meningkatkan kinerjanya. Dilihat dari segi ekonomi tahun 2016-2018 berada pada kategori ekonomis. Dilihat dari segi efisiensi tahun

2017 pada kategori tidak efisien, namun tahun 2016 dan 2018 dalam kategori efisien. Dan dilihat dari segi efektivitas tahun 2016-2017 kategori cukup efektif sedangkan pada tahun 2018 kategori efektif.

Penelitian terkait dilakukan oleh Hala *et al.*, (2022) meneliti Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis *Value of Money* di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar tahun 2020 dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan analisis *value for money* dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan keuangan desa pada Desa Tamasaju telah dilaksanakan dengan ekonomis dengan nilai 98,24%, efektifitas dengan nilai 98,24% dan efisien karena dengan nilai 98,24%. Sedangkan hasil analisis pemberian kuesioner kepada masyarakat di Desa Tamasaju diperoleh hasil perhitungan kuesioner dari tiga (3) indikator relatif sudah terpenuhi dengan nilai persentase 83% yang bermakna sangat akuntabel. Berdasarkan hasil dari kedua analisis tersebut dapat disimpulkan pengelolaan keuangan desa pada Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar tahun anggaran 2020 sangat akuntabel (Hala *et al.*, 2022).

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Yulitiawati and Rusmidarti, (2021) yaitu Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Menggunakan Pendekatan *Value For Money* Di Kabupaten OKU dengan metode campuran yaitu Teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Hasil menunjukkan dari segi ekonomi tahun 2015-2016 tergolong cukup ekonomis dan tahun 2017-2019 tergolong ekonomis yang artinya pengelolaan anggaran pemerintah sudah seminimal mungkin dalam merealisasikan anggaran program. Segi efisien tahun 2015 tergolong kurang efisien, tahun 2016 tergolong efisien, dan tahun 2017-2019

tergolong cukup efisien. Segi efektivitas tahun 2015-2018 tergolong efektif sedangkan tahun 2019 tergolong sangat efektif yang artinya kegiatan yang diprogramkan sudah terealisasi sesuai dengan yang diharapkan.

Persamaan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yaitu memiliki persamaan dalam meneliti kinerja keuangan pemerintah desa. Ditemukan beberapa hasil penelitian yang berbeda dengan variabel (komponen) yang sama namun pada objek, tahun, dan metode penelitian yang berbeda. Hal ini tentunya mendorong peneliti untuk melakukan pengujian mengenai penilaian akuntabilitas kinerja melalui pengukuran *value for money* pada daerah pemerintahan yang berbeda.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk menilai akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah desa Lokasari dengan pengukuran *value for money* yang terdiri dari ekonomi, efisien, dan efektivitas. Fokus penelitian pada laporan realisasi APBDes yang dilakukan oleh pemerintah desa Lokasari pada tiga periode yaitu mulai tahun 2020-2022. Realisasi APBDes pada Desa Lokasari Kecamatan Sidemen yang menjadi tujuan utama penelitian dilakukan. Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lokasari adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa Lokasari Tahun 2020-2022

Tahun	Pendapatan		
	Anggaran	Relalisasi	%
2020	1.987.508.718	2.022.817.260	101,78%
2021	2.097.864.031	2.092.584.739	99,75%
2022	2.339.003.504	2.336.620.219	99,90%

Sumber : Pemerintah Desa Lokasari (2024)

Tabel 1.2

Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Desa Lokasari Tahun 2020-2022

Tahun	Belanja		
	Anggaran	Realisasi	%
2020	2.144.436.416	1.934.605.727	90,22%
2021	2.193.003.262	1.964.150.959	89,56%
2022	3.285.747.071	2.950.720.625	89,80%

Sumber : Pemerintah Desa Lokasari (2024)

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 dapat dilihat bahwa capaian pendapatan dan belanja terus mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2022. Pendapatan tahun 2020 terealisasi sebesar 101, 78% dan belanja terealisasi sebesar 90,22%. Pendapatan tahun 2021 menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya yaitu terealisasi 99,75% sedangkan belanja juga menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 89,56%. Tahun 2022 realisasi capaian pendapatan menunjukkan kenaikan yaitu menjadi 99,90% sedangkan belanja juga meningkat sebesar 89,80%. Anggaran belanja lebih tinggi dibandingkan anggaran pendapatan karena adanya pembiayaan berupa SiLPA tahun berjalan yang masih harus diterima oleh Pemerintah Desa pada tahun berikutnya.

Setelah melakukan wawancara yang dilakukan oleh informan I Ketut Sunarta sebagai Sekretaris Desa Lokasari yaitu:

Hasil analisis pada Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Periode 2020-2022 setiap tahunnya terus mengalami defisit. Defisit adalah suatu keadaan di mana pengeluaran melebihi pendapatan akan tetapi keadaan tersebut dapat ditutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada periode sebelumnya. Dan Realisasi belanja pada tahun 2022 lebih tinggi daripada realisasi pendapatan karena kurangnya perencanaan dan pengendalian belanja desa untuk membeli barang dan jasa dalam membiayai kegiatan desa (Wawancara Jumat, 08 Desember 2024).

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lokasari tahun 2021-2022 masih belum mencapai target, di mana jumlah anggaran dan realisasi mengalami kelebihan, ini berarti dalam penyusunan APBD belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diindikasikan adanya program maupun kegiatan yang belum tercapai atau belum dilaksanakan sepenuhnya. Selain permasalahan tersebut, prosedur khusus dalam pengelolaan APBDes sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Desa terus berubah sehingga menyebabkan pemerintah desa harus terus belajar, teliti, dan bekerja secara ekstra untuk dapat menyesuaikan dengan peraturan yang sudah berlaku, serta permasalahan lain yaitu Desa Lokasari belum mempunyai web desa, sehingga terkait dengan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBDes hanya mengandalkan Baliho sebagai media informasi dan sebagai bahan evaluasi masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan menyelidiki kinerja keuangan dengan melakukan penelitian menggunakan hasil Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lokasari dengan judul penelitian **“Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

(APBDes) Melalui Pengukuran *Value for Money* untuk Menilai Akuntabilitas Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Desa Lokasari”

1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dapat diidentifikasi diantaranya :

1. Keterbatasan transparansi dan akuntabilitas terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga masyarakat tidak dapat mengakses informasi secara luas.
2. Pengeluaran yang tidak efektif sehingga menyebabkan defisit anggaran.
3. Peraturan terkait dengan Standar Pemerintah Desa (SAP) yang terus berubah sehingga pemerintah desa harus bekerja secara ekstra untuk mengikuti perubahan aturan tersebut.
4. Kurangnya evaluasi kinerja sehingga pemerintah desa kurang mengetahui aspek-aspek yang perlu diperbaiki.

1.3. Pembatasan Masalah

Batasan permasalahan dari identifikasi sebelumnya dalam penelitian ini terfokus pada Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Melalui Pengukuran *Value for Money* untuk Menilai Akuntabilitas Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Desa Lokasari.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui pengukuran *value for*

money untuk menilai akuntabilitas kinerja keuangan Instansi Pemerintah Desa Lokasari?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui pengukuran *value for money* untuk menilai akuntabilitas kinerja keuangan Instansi Pemerintah Desa Lokasari.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Sebagai penguat teori akuntansi sektor publik terkait penilaian kinerja keuangan berbasis *value for money* dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai penerapan pengukuran *value for money* dalam menilai kinerja keuangan pemerintah.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian diharapkan mempunyai manfaat praktis seperti berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam memahami mekanisme pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam menilai kinerja keuangan keuangan Pemerintah Desa.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat dijadikan sumber bacaan dan referensi bacaan bidang akuntansi sektor publik pada perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ekonomi, dan Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik.

c. Bagi Pemerintah Desa Lokasari

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana Pemerintah Desa Lokasari Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem, sehingga bisa meningkatkan kualitas dan motivasi kerja terutama pada aspek kinerja keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan tindakan yang seharusnya diambil dalam menghadapi tantangan pada perbaikan kinerja di masa depan.

d. Bagi Masyarakat Desa Lokasari

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai bagaimana pengelolaan dan penyusunan APBDes untuk menambah pemahaman terhadap proses pengelolaan dan penyusunan APBDes.